PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jln. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 33, Telp : (0451) 421651-421830
Palu – Sulawesi Tengah
Kode Pos 94117

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama	:	ANWAR HAFID
Jabatan	:	GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua, GUBERNUR SULAWESI TENGAH	Pihak Pertama, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH
ANWAR HAFID	**Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si** Pembina Utama Madya NIP. 19701028 199203 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	- Persentase Desa Mandiri	23,78
		- Persentase Desa sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal yang meningkat Status Desanya	30,77

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 12.070.013.579,40,	APBD
2	Program Penataan Desa	Rp. 3.572.485.360,00	APBD
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 136.315.450,00	APBD
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 741.315.450,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 10.905.969.369,00	APBD

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660816 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	**Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**	**72**
	a. Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84
	b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	b. Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah	0,7078
	c. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dalam Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	c. Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomdasi (TLHP) BPK dan APIP	100
	d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	d. Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan	100
	e. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	e. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	100
	f. Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	f. Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah	1,5
	g. Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas(ZI)	g. Nilai Capaian Pelaksanaan Pembangunan ZI	75
	h. Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan Tindaklanjut Laporan Pengaduan pada Perangkat Daerah	h. Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	12
	i. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	i. Nilai Kepatuhan Pencatatan Barang/Jasa Pemerintah Pada SPSE	100
	j. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	j. Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat daerah	1,71

	k. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	k. Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat terintegrasi	88,553
	l. Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	l. Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%
	m. Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	m. Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	4

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.878.162.308.41	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 269.853.250,00,-	APBD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 10.851.793.107,41,-	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 28.285.600,00,-	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 234.609.750,00,-	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 293.791.700,00,-	
	Kegiatan :Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 438.120.543,00,-	
	Kegiatan :Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 266.570.275,00,-	
	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 495.138.086,00,-	

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMY, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa dan Perkembangan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**8,20**
	- Meningkatnya sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	- Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Kelengkapan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaran Desa	15
		- Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa yang berkaitan dengan Pelaksanaan, Prodeskel, EPDes Kel, LomDesKel, PINDesKel dan Penetapan, Penegasan Tapal Batas Desa	15

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp. 46.251.650,-	APBD
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.799.668.600,-	APBD

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan :	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp. 46.251.650,-	APBD
	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Rp. 46.251.650,-	APBD
2.	Kegiatan :	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.799.668.600,-	APBD
	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp.524.858.900,-	APBD
	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Rp. 35.203.200,-	APBD
	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 192.767.250,-	APBD
	Sub Kegiatan :	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Rp. 46.839.250,-	APBD

Palu, November 2025

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PERKEMBANGAN DESA

EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PEMERINTAHAN DESA

No	Sasaran Program Dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi** - Meningkatnya sub dimensi Produk Desa	**Nilai Dimensi Ekonomi** - Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan ekonomi kreatif - Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Des	**8.05** 5
2	**Meningkatnya Nilai Dimensi Lingkungan** - Meningkatnya Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan	**Nilai Dimensi Lingkungan** - Nilai Sub Dimensi Pengelolaan Lingkungan - Nilai Sub Dimensi Penanggulangan Bencana	**5,08** 22 10
3	**Meningkatnya Nilai Dimensi Aksebilitas** - Meningkatnya nilai sub dimensi kondisi Akses Jalan	**Nilai Dimensi Aksebilitas** - Nilai sub dimensi Kondisi Akses Jalan - Kemudahan Akses	**3,30** 8 13
4	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa** - Meningkatnya sub dimensi kelembagaan dan pelayanan Desa	**Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa** - Nilai Sub Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	**4,58** 3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp. 2.879.371.430,-	APBD
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 35.573.550,-	APBD
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 700.488.250	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Rp. 2.879.371.430	APBD
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Rp. 2.879.371.430,-	APBD
2	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Yang menjadi Kewenangan Provinsi	Rp. 35.573.550,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Rp. 35.573.550,-	APBD
3	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 700.488.250,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Rp. 45.139.900,-	APBD
	Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	RP. 76.879.500,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Rp. 542.987.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Rp. -	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 35.481.650,-	APBD

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP : 19770820 200003 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP : 19660816 198603 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya nilai dimensi layanan dasar** - Meningkatnya nilai Dimensi Layanan Dasar	**Nilai dimensi layanan dasar** - Nilai Dimensi Layanan Dasar	**21,10** 131
2	**Meningkatnya nilai dimensi sosial** - Meningkatnya Nilai Dimensi Sosial	**Nilai dimensi Sosial** - Nilai Dimensi Sosial	**9,61** 53

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.11.648.991.728,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.15.508.956.635,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 832.973.415,00,-	APBD
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.88.180.000,00,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.13.353.151.750,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp. 24.940.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Rp. 24.940.200,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.184.771.070,-	APBD

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen muwujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektonik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP.)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, November 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama,**
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH	**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA**
Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si	**MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si**
NIP. 19660816 198603 1 009	**NIP. 19820527 200012 1 001**

BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**Meningkatnya Nilai Dimensi Ekonomi**		**15,91**
	- Meningkatnya Sub Dimensi Produksi Desa	- Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Produksi Desa dalam peningkatan produk unggulan desa dan pemanfaatan TTG	6
	- Meningkatnya Sub Dimensi Fasilitasi Pendukung Ekonomi	- Nilai Dimensi Ekonomi pada sub Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi	
2.	**Meningkatnya Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa**	- Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada sub dimensi Tata Kelola Keuangan Desa yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan dan produktivitas Aset Desa	**9,76**
	- Meningkatnya Sub Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa		37

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 104.742.000,-	APBD
2	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp. 275.621.850,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 207.702.525,-	APBD

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi	Rp. 108.158.050,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Rp. 50.514.950,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. 57.643.100.,-	APBD
2	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 511.585.500,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Rp. 65.501.600,-	APBD
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab.Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Rp. 446.083.900,-	APBD
3	Kegiatan : Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.105.365.100,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp. 1.041.541.350,-	APBD
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 63.823.750,-	APBD

Palu, November 2025

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA

MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
NIP. 19820527 200012 1 001